



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIKABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

a. bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan rekening kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2020 maka perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo ini;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS	
KABAG HUKUM	

Mengingat :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo;

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahn Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BOALEMO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 742) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a. Operasional pemerintah desa;
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. Operasional BPD
 - e. Insentif lembaga masyarakat dan atau sebutan lainnya yang ada di desa
 - f. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat

- g. Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat
 - h. Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan
 - i. Belanja Barang dan Jasa lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Insentif lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga kemasyarakatan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, kesehatan serta pemberdayaan masyarakat desa
 3. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa
 4. Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
 5. Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. lembaga pendidikan tingkat desa;
 - b. lembaga kesehatan tingkat desa;
 - c. lembaga ekonomi tingkat desa;
 - d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
 - e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan desa.
 6. Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. siswa berprestasi;
 - b. masyarakat berprestasi;
 - c. masyarakat miskin; dan
 - d. masyarakat atau orang terlantar.

2. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Format kode rekening kegiatan sebagaimana tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

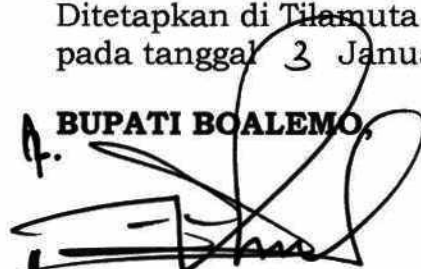
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR...10...)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BOALEMO

A. Format KodeRekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Insentif Operator Aplikasi Siskeudes
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	11	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD
2	1	12	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Bangunan/Rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI
2	1	13	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan buku dan peralatan belajar PAUD lainnya
2	1	14	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Wahana permainan anak di PAUD
2	1	15	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Taman belajar keagamaan
2	1	16	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Saran dan prasarana bermain dan kreatifitas anak
2	1	17	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Olahraga Desa
2	1	18	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa
2	1	19	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan belajar masyarakat
2	1	20	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan belajar masyarakat
2	1	21	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif
2	1	22	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Film dokumenter
2	1	23	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan peralatan kesenian dan kebudayaan
2	1	24	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan pembuatan galeri atau

2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	10	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa
2	2	11	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Mobil/Kapal Motor Untuk Ambulance Desa
2	2	12	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Balai Pengobatan
2	2	13	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Posbindu
2	2	14	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan TIKAR Pertumbuhan (Alat Ukur Tinggi Badan Untuk Bayi Sebagai Media Deteksi Dini Stunting)
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	21	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Perahu/Katinting bagi Desa-Desa di Kepulauan dan Kawasan DAS
2	3	22	Pengadaan, Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu
2	3	23	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Dermaga Apung
2	3	24	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambat Apung (buoy)
2	3	25	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa
2	3	26	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antara Permukiman Ke Lokasi Wisata
2	3	27	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Desa
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	18	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Permukiman
2	4	19	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Pedestrian
2	4	20	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase
2	4	21	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
2	4	22	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Tandon Air Bersih atau Penampung Air Bersih
2	4	23	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lindung
2	4	24	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah

2	4	26	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangunan Bank Sampah Desa
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	04	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Pembauatan Terasering
2	5	05	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Kolam Untuk Mata Air
2	5	06	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Plesengan Sungai
2	5	07	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Pencegahan Kebakaran Hutan
2	5	08	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Pembangunan Talud
2	5	09	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Papan Informasi lingkungan hidup
2	5	10	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Pemulihan stock ikan (Restocking) Lokal
2	5	11	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Rehabilitasi kawasan mangrove
2	5	12	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Penanaman Bakau
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Desa
2	6	05	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Website Desa
2	6	06	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)
2	6	07	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Radio Single Side Band (SSB)
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa**
2	7	03	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
2	7	04	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
2	7	05	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
2	7	06	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin
2	7	07	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Instalasi Biogas

2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	04	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Ruang Ganti dan/atau Toilet
2	8	05	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pergola
2	8	06	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Gazebo
2	8	07	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lampu Taman
2	8	08	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pagar Makan Tanaman
2	8	09	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pondok Wisata (Homestay)
2	8	10	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Panggung Kesenian/Pertunjukan
2	8	11	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kios Cenderamata
2	8	12	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pusat Jajanan Kuliner
2	8	13	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tempat Ibadah
2	8	14	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Menara Pandang (Viewing Deck)
2	8	15	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Gapura Identitas
2	8	16	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Anak
2	8	17	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Outbound
2	8	18	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Taman Rekreasi
2	8	19	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tempat Penjualan Tiket
2	8	20	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Angkutan Wisata
2	8	21	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tracking Wisata Mangrove
2	8	22	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan Witas Snorkeling dan Diving
2	8	23	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Papan Interpretasi
2	8	24	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
2	8	25	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pembuatan Media Promosi (Brosur, Leaflet dan Audio Visual)
2	8	26	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Internet Corner
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
2	9		Sub Bidang Produksi dan Pengolahan hasil Usaha Pertanian dan/atau Perikanan dan Pertanian
2	9	01	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan bendungan berskala kecil
2	9	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Embung
2	9	03	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan irigasi
2	9	04	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Pencetakan lahan pertanian
2	9	05	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan kolam ikan
2	9	06	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan kapal penangkapan ikan
2	9	07	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan tempat pendaratan kapal penangkap ikan
2	9	08	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan tambak garam
2	9	09	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan kandang ternak
2	9	10	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan mesin pakan ternak
2	9	11	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan mesin penetas telur
2	9	12	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (Saprotan)
2	9	13	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Gudang pendingin
2	9	14	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan pengeringan hasil pertanian (lantai Jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra)
2	9	15	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir, dan pompa air)
2	9	16	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan alat penangkap ikan ramah lingkungan (Bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
2	9	17	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan alat bantu penangkapan ikan (Rumpon dan lampu)
2	9	18	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan keramba jaring apung

2	9	21	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan alat produksi es
2	9	22	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan gudang Desa (Penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan)
2	9	23	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat penjemuran ikan
2	10		Sub Bidang Jasa serta Usaha Industri Kecil dan/atau Industri Rumahan
2	10	01	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Jahit
2	10	02	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor
2	10	03	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Penepung Ikan
2	10	04	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Penepung Ketela Pohon
2	10	05	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Bubut Untuk Mebeler
2	10	06	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Packaging Kemasan
2	10	07	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Roaster Kopi
2	10	08	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Percetakan
2	10	09	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bioaskop Mini Perikanan
2	10	10	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Alat Pengolahan hasil Perikanan
2	11		Sub Bidang Pemasaran
2	11	01	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar Desa
2	11	02	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar Sayur
2	11	03	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar Hewan
2	11	04	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan
2	11	05	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Toko Online
2	11	06	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Gudang Barang
2	11	07	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tempat Pemasaran Ikan
2	12		Sub Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG)
2	12	01	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Penggilingan Padi
2	12	02	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peraut Kelapa
2	12	03	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Penepung Biji-Bijian
2	12	04	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pencacah Pakan Ternak
2	12	05	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Sangrai Kopi
2	12	06	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pemotong dan Pengiris Buah dan Sayuran
2	12	07	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pompa Air
2	12	08	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Traktor Mini
2	12	09	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Desalinasi Air Laut
2	12	10	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pengolahan Limbah Sampah
2	12	11	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kolam Budidaya
2	12	12	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Mesin Pembuat Es dari Air Laut (Slurry Ice)
2	13		Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa
2	13	01	Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam
2	13	02	Pembangunan Jalan Evakuasi dalam Bencana Gunung Berapi
2	13	03	Pembangunan Gedung Pengungsian
2	13	04	Pembersihan Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam
2	13	05	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam
2	13	06	Pembuatan Peta Potensi Rawan Bencana di Desa
2	13	07	P3K untuk Bencana
2	13	08	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah dll) Skala Lokal Desa

3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**

4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** lain-lain kegiatan sub
4	7	90-99	bidang Perdagangan dan Perindustrian*
4	8		Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar
4	8	01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4	8	02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
4	9		Sub Bidang Sarpras Desa Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal yang Tersedia
4	9	01	Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa
4	9	02	Pengelolaan Transportasi Desa
4	9	03	Pengembangan Energi Terbarukan
4	9	04	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
4	10		Sub Bidang Pengelolaan UEP serta Pengelolaan Sarpras Ekonomi

4	10	01	Pengelolaan Produksi dan Hasil Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian
4	10	02	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil
4	10	03	Pendirian dan Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
4	10	04	Pengembangan Usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa
4	10	05	Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	10	06	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Kemajuan Ekonomi
4	10	07	Pengelolaan Pemasaran Hasil Produksi Usaha BUMDesa dan Usaha Ekonomi
4	11		Sub Bidang Penguatan dan Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Tanggap Darurat Bencana Kejadian Luar Biasa
4	11	01	Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana
4	11	02	Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
4	11	03	Pelatihan Tenaga Sukarelawan untuk Penanganan Bencana
4	11	04	Pelatihan Pengenalan Potensi Bencana dan Mitigasi
4	12		Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
4	12	01	Pembibitan Pohon Nangka
4	12	02	Reboisasi
4	12	03	Rehabilitasi Lahan Gambut
4	12	04	Pembersihan Daerah Aliran Sungai
4	12	05	Pembersihan Daerah Sekitar Pantai (Bersih Pantai)
4	12	06	Pemeliharaan Hutan Bakau
4	12	07	Pelatihan Rehabilitasi Mangrove
4	12	08	Pelatihan Rehabilitasi Terumbu Karang
4	12	09	Pelatihan Pengolahan Limbah
4	13		Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Memperkuat Tata Kelola Desa yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial
4	13	01	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara Swakelola oleh Desa
4	13	02	Mengembangkan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara Berkelanjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA yang ada di Desa
4	13	03	Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Prioritas, Potensi dan Nilai Kearifan Lokal
4	13	04	Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak kepada Kepentingan Warga Miskin, Warga disabilitas
4	13	05	Mengembangkan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	13	06	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Desa yang dilakukan Melalui Musyawarah Desa
4	13	07	Melakukan Pendampingan Masyarakat Desa melalui Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa
4	13	08	Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Masyarakat Desa untuk Pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa
4	13	09	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambahan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa

4	2	4	Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01
4	2	4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99
4	2	4	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01
4	2	5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99
4	2	5	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3		Pendapatan Lain-lain
4	3	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01
4	3	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01
4	3	2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01
4	3	3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01
4	3	4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada anggaran berjalan
4	3	5	01
4	3	5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada anggaran berjalan
4	3	6	Bunga Bank
4	3	6	01
4	3	6	Bunga Bank
4	3	9	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99
4	3	9	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5			BELANJA
5	1		Belanja Pegawai
5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01
5	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02
5	1	1	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99
5	1	1	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01
5	1	2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02
5	1	2	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99
5	1	2	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

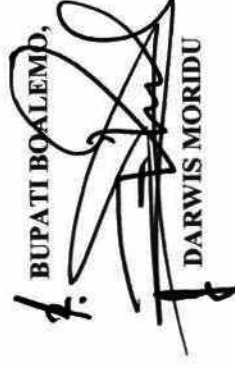
5	1	3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3 01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3 02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3 03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3 04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4	Tunjangan BPD
5	1	4 01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4 02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2		Belanja Barang dan Jasa
5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1 01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1 02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1 03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1 04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1 05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1 06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1 07	Belanja Bahan/Material
5	2	1 08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1 09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1 10	Belanja Obat-obatan
5	2	1 11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1 12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1 90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2	Belanja Jasa Honorarium
5	2	2 01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2 02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2 03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2 04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2 05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2 90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	06	Belanja Biaya Study
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal

5	3	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1 01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1 02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1 03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1 04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1 05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1 90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2 02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2 03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2 04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2 05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2 06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2 07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2 08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2 09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2 10	Belanja Modal Mesin
5	3	2 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2 90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3	Belanja Modal Kendaraan
5	3	3 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3 02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3 03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3 04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3 05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3 90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4 03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya

6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya


 BUPATI BOALEMO,
 DARWIS MORIDU